

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Kolaborasi di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi

Optimization Strategy for Village Forest Management Based on Collaboration In Rogo Village Dolo Selatan District Sigi Regency

Sitti Aminah^{1*}, Sri Jumiati², Siti Hadija³

¹²³Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu

*Corresponding author: sittiaminah76@gmail.com

ABSTRAK

Hutan desa sebagai salah satu skema perhutanan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pengelolaannya kerap menghadapi tantangan seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya akses permodalan dan pasar, serta rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis kondisi pengelolaan Hutan Desa di Desa Rogo Kabupaten Sigi; menganalisis peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengembangan Hutan Desa; mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan hutan desa; dan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Hutan Desa berbasis kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM, serta dinas terkait. Analisis data menggunakan SWOT dan selanjutnya direduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam upaya optimalisasi pengelolaan Hutan Desa Rogo yaitu Penguatan kelembagaan LPHD, peningkatan kolaborasi multipihak, perencanaan partisipatif, pengembangan usaha berbasis HHBK, penguatan monitoring dan penyelesaian konflik, serta pendanaan berkelanjutan melalui penerapan good forest governance untuk mewujudkan pengelolaan Hutan Desa yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan yang memberikan manfaat ekologis, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hutan Desa Rogo, Kolaborasi, Pengelolaan, Strategi Optimalisasi

ABSTRACT

Village forests as a social forestry scheme have a strategic role in maintaining ecosystem sustainability while improving the welfare of village communities. However, their management often faces challenges such as weak institutional capacity, limited access to capital and markets, and low synergy between stakeholders. This study aims to: (1) Analyze the condition of Village Forest management in Rogo Village, Sigi Regency, (2) Analyze the role of local government and other stakeholders in Village Forest development; (3) Identify supporting factors and inhibiting factors in village forest management; and (4) Formulate strategies for optimizing Village Forest management based on effective and sustainable collaboration. This study uses a qualitative and quantitative descriptive approach. The research location is in Rogo Village, Dolo Selatan District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province. Data were obtained through in-depth interviews, observations, documentation studies, and focus group discussions (FGDs) with the management of the Village Forest Management Institution (LPHD), village government officials, community leaders, NGOs, and related agencies. Data analysis used SWOT and then reduced, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the strategic recommendations produced in an effort to optimize the management of the Rogo Village Forest are strengthening LPHD institutions, increasing multi-party collaboration, participatory planning, developing NTFP-based businesses, strengthening monitoring and conflict resolution, and sustainable funding through the implementation of good forest governance to realize inclusive, adaptive and sustainable Village Forest management that provides ecological, social and economic benefits for the community.

Keywords: Rogo Village Forest, Collaboration, Management, Optimalization Strategy

ARTICLE IDENTIFIERS

ORIGINAL ARTICLE

Volume 9 - Issue 10 - 2026

Pages 4640-4648

DOI: 10.56338/jks.v9i10.12533

ARTICLE HISTORY

Received: 27 July, 2026

Revised: 22 September, 2026

Accepted: 13 October

Publish: 27 October, 2026

PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung ketahanan pangan, menyediakan sumber penghidupan masyarakat, serta sebagai benteng terakhir dalam mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia, kawasan hutan tidak hanya menjadi sumber daya ekologis, tapi juga menjadi ruang hidup dan ruang kelola masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.

Inisiatif pemerintah sebagaimana program prioritas nasional yang terus menjadi fokus utama dalam upaya pemanfaatan hutan lestari demi kesejahteraan rakyat, di mana masyarakat lokal dan adat diberi ruang untuk mengakses lahan hutan negara melalui skema perhutanan sosial, sebagai landasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan penguasaan lahan, degradasi lingkungan dan kemiskinan melalui legalisasi akses kelola hutan oleh masyarakat. Program perhutanan sosial adalah sebuah sistem pengelolaan hutan lestari dimana kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat itu menjadi pelaku utama untuk mengelola hutan negara atau hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat dalam tata kelola sinergi antara ekonomi, ekologi dan sosial, dalam lima skema perhutanan sosial yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat.

Skema utama dalam perhutanan sosial tersebut adalah hutan desa, yakni hutan negara yang dikelola oleh masyarakat desa dan difasilitasi melalui kelembagaan desa seperti lembaga pengelola hutan desa (LPHD). Namun dalam praktiknya, pengembangan hutan desa masih menghadapi tantangan besar, antara lain lemahnya kapasitas kelembagaan lokal, terbatasnya akses permodalan dan pasar, serta rendahnya sinergi antara para pemangku kepentingan (Satria & Hermianto, 2020).

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan desa sangat bergantung pada kemampuan kolaborasi antar aktor, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pendekatan kolaboratif dirasakan sangat relevan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda. Kolaborasi tidak hanya menciptakan ruang partisipatif, tetapi juga mendorong pembagian peran, tanggungjawab, dan manfaat yang adil di antara pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

Model kolaborasi dalam pengembangan hutan desa dapat mempertemukan aktor negara yaitu Dinas kehutanan dan KPH, masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi dan sektor swasta dalam wadah tata kelola yang inklusif. Kerjasama ini mampu mengatasi keterbatasan sumber daya masing-masing pihak serta memperkuat keberlanjutan ekosistem dan ekonomi lokal. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan good forest governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Kolaborasi juga dapat memanfaatkan modal sosial yang tumbuh di masyarakat desa hutan, seperti kepercayaan, norma gotong-royong, dan jaringan sosial yang kuat, sebagai basis penguatan kelembagaan dan inovasi lokal. Dalam hal ini, kolaborasi bukan hanya strategi teknis, melainkan juga pendekatan sosial politik yang menekankan pada dialog, negosiasi, dan pembelajaran bersama.

Meskipun kebijakan hutan desa memberikan ruang legal bagi masyarakat desa untuk mengelola hutan negara, namun dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan hasilnya, sebagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan desa di lokasi penelitian yaitu di Desa Rogo Kabupaten Sigi antara lain; lemahnya kapasitas LPHD yang dibentuk baik aspek teknis maupun administrasi yang belum memadai, minimnya sinergi multi-pihak (koordinasi dan kolaborasi) antara masyarakat desa hutan dengan instansi pemerintah, KPH, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta belum berjalan secara efektif, rendahnya partisipasi dan kepemilikan masyarakat dan masih tingginya ketergantungan pada bantuan luar. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang peran pemerintah, kondisi aktual pengelolaan hutan desa Di Desa Rogo, dan strategi pemerintah daerah dan desa dalam mendorong pengembangan hutan desa berbasis kolaboratif. Tujuan Penelitian ini untuk (1) Menganalisis kondisi pengelolaan Hutan Desa di Desa Rogo Kabupaten Sigi, (2) Menganalisis peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengembangan Hutan Desa di Desa Rogo

Kabupaten Sigi; (3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan factor penghambat pengelolaan hutan desa; dan (4) Merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Hutan Desa berbasis kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan di Desa Rogo

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rogo, yang terletak di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Rogo merupakan salah satu desa yang mendapatkan izin pengelolaan hutan desa melalui skema perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Hutan Desa di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, yaitu: (1) Pengurus dan anggota LPHD Sebagai pihak utama yang mengelola dan mengatur operasional hutan desa berdasarkan mandat masyarakat dan regulasi yang berlaku, (2) Perangkat Pemerintah Desa Rogo Termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan aparat lainnya yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa yang berkaitan dengan kehutanan, (3) Kelompok Masyarakat Pengguna Hutan (KMPH) Warga yang secara aktif memanfaatkan hasil hutan kayu dan non-kayu, seperti petani agroforestri, pengrajin hasil hutan, dan pelaku ekonomi lokal lainnya, (4) Tokoh masyarakat dan adat, Pihak yang memiliki pengaruh sosial dalam mengarahkan norma, nilai, dan budaya lokal terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan, (5) Pihak eksternal pendukung yaitu LSM lingkungan, lembaga pendamping program perhutanan sosial, serta dinas terkait (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi). Sampel responden diambil secara sengaja (*purposive*) sebanyak 13 orang yaitu dinas kehutanan 2 orang, aparat desa 3 orang, KPH 2 orang, LPHD 3 orang, LSM pendamping 1 orang dan tokoh masyarakat 2 orang.

Jenis data yang digunakan meliputi: 1. Data Primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui proses interaksi di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui a). Observasi langsung, yaitu pengamatan terhadap aktivitas masyarakat dalam pengelolaan hutan desa, pelaksanaan program kolaboratif, serta dinamika interaksi antar pemangku kepentingan, b). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci seperti pengurus LPHD, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok petani hutan, serta pihak pendamping (LSM atau dinas kehutanan), c). Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali informasi kolektif dari berbagai pihak terkait strategi, tantangan, dan peluang pengelolaan hutan desa. 2. Data Sekunder; merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen atau sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi pengembangan hutan desa berbasis kolaborasi di Desa Rogo. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada dinamika sosial, institusional, dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan desa, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata. Analisis data menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis internal, fokus diberikan pada penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada. Analisis eksternal, akan dievaluasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Selanjutnya menyusun matriks SWOT berdasarkan hasil survei dengan menggunakan kuesioner kepada masyarakat lokal selaku responden dan dinas kehutanan, aparat desa, KPH, LPHD, LSM, dan tokoh masyarakat selaku informan kunci dengan pendekatan focus group discussion (FGD).

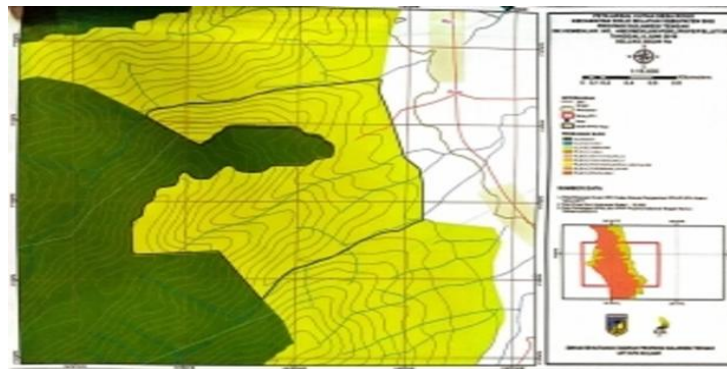
Matriks IFAS dan EFAS (*internal dan eksternal factor analysis summary*) diberikan skor bobot dan rating masing-masing faktor SWOT untuk merumuskan strategi alternatif (SO, WO, ST, WT). Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan yaitu; (1) Reduksi data: memilah, merangkum, dan menyederhanakan data dari lapangan (2) Penyajian data: menampilkan data dalam bentuk narasi, matriks, atau skema (3) Penarikan kesimpulan: mencari pola,

hubungan, dan makna dari data yang terkumpul dan juga menggunakan triangulasi data untuk menguji keabsahan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Rogo ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 4663/MENLHK-PSKL/PSL.0/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan luas 356 Ha. Hutan Desa Rogo. Secara administrasi Hutan Desa Rogo terletak di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Berdasarkan fungsi hutannya, areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Rogo berada dalam kawasan Hutan Lindung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Desa Pulu
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Hutan Desa Baluase
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Hutan Lindung
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Areal Penggunaan Lain (APL)



Gambar 1. Peta Lokasi Hutan Desa Rogo

Pada areal persetujuan Perhutanan Sosial Hutan Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi telah dilakukan penandaan Batas sepanjang 9,68 km dengan jumlah pal seluruhnya sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) buah.

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi HHBK yang dilakukan oleh KPH Kulawi, Areal Persetujuan pengelolaan perhutanan Sosial LPHD Rogo Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi memiliki potensi HHBK yang dapat diusahakan dan dikembangkan oleh LPHD adalah berupa rotan dan bambu. Selain HHBK terdapat potensi lain yang dapat dikembangkan dan diusahakan adalah tanaman pisang dan tanaman buah-buahan lainnya. Sesuai dengan potensi yang ada, LPHD Rogo merencanakan untuk membentuk dua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan jenis komoditas yang diusahakan adalah rotan, bambu dan pisang.



Gambar 2. Pembibitan Rotan dan Bambu Pisang



Gambar 3. Pemanfaatan Rotan



Gambar 4. Pemanfaatan

Masyarakat di Desa Rogo memanfaatkan rotan sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga, baik dengan menjualnya dalam bentuk bahan mentah maupun mengolahnya menjadi berbagai produk kerajinan dan mebel rotan yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Selain itu, tanaman pisang juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan buah dan daunnya.

Hutan Desa Rogo memiliki potensi alam yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang mengedepankan pelestarian lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat Desa Rogo menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi dalam menjaga kelestarian hutan serta mendukung pengembangan sektor pariwisata. Sebagian kelompok masyarakat telah mulai terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pengembangan usaha mikro berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK). Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata secara terorganisasi masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan berbasis komunitas agar tercipta pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan partisipatif.

Peran Kolaboratif Pemerintah dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Desa Rogo. Pemerintah melalui KPH Kulawi bekerja sama dengan FORCLIME serta berbagai instansi terkait terus berupaya memperkuat pengelolaan Hutan Desa Rogo melalui pendampingan pengembangan kelembagaan masyarakat, hal ini sejalan dengan (Tarigan et al., 2021), (Sarvianto, 2024) yang merupakan suatu bentuk kolaborasi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat LPHD melalui pembentukan dan pengembangan KUPS. Kegiatan ini diwujudkan melalui rapat koordinasi peningkatan kelas KUPS dari kategori “Blue” menjadi “Silver” sesuai dengan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan kegiatan karya bakti penanaman pohon, khususnya di kawasan bantaran sungai Desa Rogo, dengan melibatkan TNI, Polri, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk upaya reboisasi dan mitigasi bencana lingkungan. Dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, pemerintah menerapkan patroli hutan secara mandiri maupun terpadu serta memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan drone, untuk mendeteksi wilayah yang rawan terhadap perambahan hutan dan praktik illegal logging. Pemerintah juga aktif memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat lainnya guna meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah mengembangkan program “Sekolah Lapang” yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan, khususnya pengembangan tanaman bambu bagi anggota kelompok perhutanan sosial. Selain itu, pemerintah mendukung penerbitan izin perhutanan sosial seluas 3.831 hektar di wilayah kerja KPH Kulawi, termasuk Desa Rogo, sebagai langkah untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis lokal dan berkelanjutan.

Pengembangan perhutanan sosial berbasis kolaborasi fokus pada sinergi dan kemitraan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan dan pengelolaan hutan, pengembangan usaha berbasis hasil hutan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan.

Perlindungan dan Pengelolaan Hutan; meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem. Melakukan penataan areal dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Pengembangan Usaha Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu; menghubungkan usaha-usaha yang sudah ada dan membentuk usaha baru dengan fokus pada pemanfaatan hasil hutan. Mendorong pemasaran produk secara kolektif untuk meningkatkan daya saing. Mengembangkan produk olahan berbasis hasil hutan bukan kayu dengan nilai tambah (Mulyana & Moeis, 2022).

Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan; meningkatkan kapasitas pendampingan perhutanan sosial melalui kolaborasi antar pihak. Mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat seperti koperasi dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Kemitraan Lingkungan; membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk LSM, akademisi, dan dunia usaha untuk mendukung perhutanan sosial. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan terkait perhutanan sosial. Dalam rangka percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial serta meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 245 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kelestarian hutan (Presidential Regulation of Indonesia No.28/2023, 2023).

Analisis Indikator SWOT

Kekuatan (*Strenghts*)

Beberapa kekuatan dalam pengelolaan Hutan Desa di Desa Rogo: (1). Potensi Sumber Daya Alam memiliki kekhasan tersendiri pada pengembangan pemanfaatan HHBK, (2) minat petani dalam melaksanakan kegiatan hutan desa saat ini masih sangat tinggi didukung dengan harga komoditas kehutanan khususnya HHBK lebih tinggi dan stabil. (3) Pola pengembangan dan pemberdayaan KTH lebih mudah dimengerti dan diimplementasikan oleh para petani.

Kelemahan (*Weakness*)

Beberapa kelemahan dalam pengelolaan Hutan Desa di Desa Rogo yaitu: (1) kurangnya informasi kepada masyarakat sekitar pengelola hanya berfokus untuk mempromosikan produksi yang dihasilkan setiap KTH, (2) masih ada dari sebagian masyarakat belum mengetahui terkait kegiatan hutan desa di KPH Desa Rogo, (3) Akses menuju lokasi jauh dari Ibu Kota Kabupaten Sigi, menjadi kendala bagi para penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dalam memfasilitasi dan pemberdayaan KTH, (4) kurangnya sarana dan prasarana sehingga perlu adanya pengembangan fasilitas modern.

Peluang (*Opportunity*)

Beberapa peluang pada pengelolaan hutan desa Rogo yaitu (1) Tersedianya lokasi pengelolaan program perhutanan sosial di wilayah kerja KPH Kulawi, (2) adanya dukungan masyarakat melalui pola kolaborasi atau kemitraan dan dukungan dari Pemda setempat, KPH, Dinas Provinsi dan aturan pemerintah tentang kemitraan kehutanan dalam pengelolaan program hutan desa sangat mendukung. (3) Semangat masyarakat mau ikut serta mengelola Hutan Desa yang nantinya dapat menguntungkan masyarakat sebagai bahan baku tambahan yang sangat signifikan dan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (4) Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan inovasi potensi yang ada pada Program Perhutanan Sosial di KPH Kulawi.

Ancaman (*Threats*)

Beberapa ancaman yang ada di Hutan Desa Rogo yaitu (1) Berkurangnya minat petani dalam pengembangan HHBK disetiap KTH tidak dilengkapi dengan fasilitas yang modern yang menunjang pengelolaan hutan desa di KPH Rogo. (2) Bencana Alam seperti kebakaran Hutan dan lahan, tanah longsor, banjir masih menjadi kekhawatiran karena masih ada budaya masyarakat yang masih melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan dan hutan, (3) kurangnya pengembangan potensi dari inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (4) Pola pikir masyarakat yang masih ingin instan menjadi ancaman untuk kegiatan Perhutanan Sosial.

Tabel 1. Matriks Faktor Internal (IFAS)

Faktor Internal	Kategori	Bobot (Estimasi)	Rating	Skor
Kemitraan lintas sektor	Strength	0.20	4	0.80
Keterlibatan masyarakat	Strength	0.15	3	0.45
Penguatan KUPS	Strength	0.15	3	0.45
Kualitas pendamping belum optimal	Weakness	0.25	2	0.50
Tantangan Usaha Tematik	Weaknes	0.25	2	0.50
Total		1		2.70

Tabel 2. Matriks Faktor Eksternal (EFAS)

Faktor Eksternal	Kategori	Bobot (Estimasi)	Rating	Skor
Perpres 28/2023 sebagai peluang hukum	Opportunity	0.25	4	1.00
Dukungan lintas Lembaga	Opportunity	0.25	3	0.75
Konflik tenurial	Threat	0.30	2	0.60
Ketergantungan pendanaan	Threat	0.20	2	0.40
Total		1		2.75

Hasil IFAS sebesar 2,70 dan EFAS sebesar 2,75 menunjukkan bahwa posisi Perhutanan Sosial berada pada kondisi yang cukup menguntungkan, di mana faktor internal dan eksternal mampu memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pengelolaan. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kekuatan yang dimiliki dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi akses pasar dan pendampingan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi yang direkomendasikan adalah strategi pertumbuhan (*growth-oriented strategy*) yang menitikberatkan pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal secara maksimal.

Strategi Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Hutan Desa Rogo

Sumber daya alam dalam wilayah Perhutanan Sosial yang diusahakan oleh masyarakat di kawasan Hutan Desa Rogo dalam strategi pengembangannya berbasis kolaborasi harus berjalan efektif dan efisien. Pengembangan hutan desa tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan batas administratif kawasan hutan, tetapi harus mempertimbangkan tipologi penggunaan lahan di sekitarnya, kondisi biofisik, serta karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang memengaruhi pola pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Pendekatan ini penting karena setiap lanskap memiliki karakteristik dan dinamika penggunaan lahan yang berbeda sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang spesifik sesuai tipologinya (von Groß et al., 2024), (Supriyanto et al., 2024). Strategi pengembangan perhutanan sosial, termasuk Hutan Desa, memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat. Pendekatan kolaboratif menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi perhutanan sosial karena mampu memperkuat koordinasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan (Hamzah & Hasannudin, 2025), (Masyarakat et al., 2024). Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial (Hutan Desa) berbasis Kolaborasi melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat setempat. Elaborasi Strategi antara lain: (1) Kolaborasi Fenthahelix; Penyatuan berbagai pihak (pemerintah, akademisi, masyarakat, pengusaha dan media) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perhutanan sosial, (2). Kesadaran Masyarakat; Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan dan lingkungan

melalui edukasi, sosialisasi dan pelatihan, (3) Komitmen parapihak; Memastikan komitmen para pihak dan Pengembangan Hutan Desa.

Tabel 3. Matriks SWOT Strategi Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Rogo

Internal Eksternal	Internal	Strength (S)	Weaknesses (W)
		Potensi sumber daya alam (SDA), Minat masyarakat lokal, Pola pengembangan hutan desa, Legalitas hutan desa dan kelembagaan	Kurangnya informasi, Rendahnya kapasitas SDM, Terbatasnya sarana prasarana, dan belum optimalnya pemanfaatan yang berkelanjutan
Opportunities (O)		Strategi S-O	Strategi W-O
	Tersediannya lokasi pengelolaan hutan desa, adanya dukungan masyarakat lokal dan pemerintah, memberikan penghasilan tambahan, Peluang peningkatan taraf hidup masyarakat dan ekonomi daerah	Memanfaatkan dukungan kebijakan, Menerapkan kemitraan, pola desain pengembangan dan mengembangkan unit usaha	Melibatkan Petani di luar anggota dalam mengembangkan HHBK, Membentuk masyarakat peduli api, Perlu adanya pemberdayaan yang lebih kepada masyarakat sekitar hutan dan lebih melibatkan peran mereka agar pola pikir instan dapat di ubah.
Threats (T)		Strategi S-T	Strategi W-T
	Rendahnya minat masyarakat, terjadinya bencana alam, masi rendahnya teknologi dan inovasi, serta paradigma masyarakat yang berorientasi pada hasil	Membuka akses informasi, Melakukan pemberdayaan masyarakat, memperbaiki akses jalan serta penguatan legalitas lahan	Meningkatkan minat petani, melakukan mitigasi bencana, melakukan peningkatan sumber daya manusia dan advokasi kebijakan, melibatkan pihak civil society

Strategi S-O

Memanfaatkan tersedianya lahan yang cukup luas sebagai lokasi strategi pengelolaan hutan Desa Rogo;
Menerapkan Kemitraan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat miskin di Desa Rogo;
Menerapkan Pola desain pengembangan kinerja masing-masing dalam mengelola HHBK sehingga masyarakat sekitar kawasan hutan dapat merasakan dampak positif dari pengelolaan hutan desa Rogo;
Pemanfaatan lahan dan upaya perlindungan HHBK rotan dan tanaman pisang.

Strategi W-O

Melibatkan Petani di luar anggota dalam mengembangkan HHBK disetiap KTH tidak dilengkapi dengan fasilitas yang modern, yang menunjang pengembangan hutan desa;
Membentuk masyarakat peduli api, dan pengadaan sarana dan prasarana yang menuunjang untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Mengadakan bimbingan teknis kepada petani hutan desa untuk dapat berinovasi meningkatkan kinerja dan kesejahteraan masyarakat.
Perlu adanya pemberdayaan yang lebih kepada masyarakat sekitar hutan dan lebih melibatkan peran mereka agar pola pikir instan dapat di ubah.

Strategi S-T

Membuka akses informasi untuk pemasaran hasil produksi dari LHPD melalui dukungan masyarakat dan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi dan akses.
Melakukan pemberdayaan masyarakat agar petani lebih memahami fungsi dan peran untuk pengembangan hutan desa.

Memperbaiki akses jalan menuju lokasi agar penyuluh kehutanan dengan mudah melakukan pemberdayaan kepada LPHD, dalam pengembangan hutan desa.

Mendorong kerjasama pemerintah dan LPHD bekerjasama dalam menyediakan fasilitas penunjang pengembangan hutan desa agar dapat dilakukan secara maksimal.

Strategi W-T

Meningkatkan minat petani untuk mengelola hutan desa melalui edukasi dan peningkatan keterampilan berusaha dan manajemen keuangan sederhana (cash flow) dalam pengembangan hutan desa melalui program Perhutan Sosial di Desa Rogo.

Melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga dapat memberikan lebih banyak manfaat untuk pengembangan hutan desa.

Melibatkan pihak civil society seperti; akademisi, NGO, praktisi dan pihak lainnya dalam memberikan informasi dan inovasi dalam pengembangan hutan desa.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Strategi optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Hutan Desa Rogo berbasis kolaborasi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memiliki peran penting dalam pengembangan hutan desa, baik dari sisi regulasi, pendampingan, maupun fasilitasi akses terhadap sumber daya dan informasi. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa dalam mendorong pengembangan Desa Rogo melalui penguatan kelembagaan (pembentukan dan legislasi LPHD yang inklusif, peningkatan kapasitas LPHD, sinergi LPHD), Perencanaan partisipatif (pemetaan partisipatif wilayah kelola hutan, penyusunan rencana, dan integrasi LPHD dengan melibatkan multi-pihak) dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan pihak eksternal (KPH, akademisi, swasta dan LSM), koordinasi lintas sektor, membangun forum kolaborasi, pengawasan dan monitoring, penyelesaian konflik dan tata kelola inklusif serta pendanaan berkelanjutan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Hamzah, B., & Hasannudin, D. A. L. (2025). Integrasi Ekonomi Sirkular dalam Strategi Kolaboratif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Analisis Multi-dimensi Keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 17(1), 73–87. <https://doi.org/10.24259/jhm.v17i1.44325>
- Masyarakat, E., Hutan, S., Kunci, K., & Sosial, P. (2024). p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534 Available online at <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>. 4(6), 429–432.
- Mulyana, M., & Moeis, J. P. (2022). Dampak program perhutanan sosial terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: bukti empiris dari Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18124>
- Sarvianto, D. F. (2024). Kolaborasi Pendampingan Perhutanan Sosial: Perpektif Struktural. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.15, No(3), 284–291. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Satria, B. A., & Hermianto, H. (2020). Collaborative Governance Dalam Program Perhutanan Sosial Pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 98–110. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2546>
- Supriyanto, B., Juniar Puspita, I., Nuryanto, I., & Hasnawir. (2024). Integrated Area Development: A New Social Forestry Landscape Approach in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1299(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1299/1/012006>
- Tarigan, A. P. P., Karuniasa, M., & Saleh, C. A. A. (2021). Village forest management for mitigation of climate change and contribution to community social-economic resilience. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 724(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012107>
- von Groß, V., Sibhatu, K. T., Knohl, A., Qaim, M., Veldkamp, E., Hölscher, D., Zemp, D. C., Corre, M. D., Grass, I., Fiedler, S., Stiegler, C., Irawan, B., Sundawati, L., Husmann, K., & Paul, C. (2024). Transformation scenarios towards multifunctional landscapes: A multi-criteria land-use allocation model applied to Jambi Province, Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 356(March), 120710. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120710>